

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMALSUAN ISI SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH YANG BERAKIBAT MERUGIKAN ORANG LAIN

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 948 K/PID/2020)

Sarwedi¹
Dr. Ibnu afan, SH, M.Hum²
Dr. Marlina, SH, M.Hum³

ABSTRAK

Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Saat ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya

Adapun permasalahan nya adalah Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan isi surat dalam peraturan perundang - undangan?, Bagaimana pertanggungawaban atas tindakan pemalsuan isi surat dalam peraturan perundang - undangan?, Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan pemalsuan isi surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 958 K/PID/2020?

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum.

Hasil Penelitian Pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan dalam peraturanperundang-undangan, pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat. Pertanggungawaban hukum atas pemalsuan surat Gubernur Sulawesi tengah ini yang dimuat dalam pasal 263 KUHPdengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan dalam kasus atas tindakan pemalsuan isi surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDMG. ST/2015 hakim pengadilan Negeri Palu menjatuhkan hukuman kepada terdakwa hanya 3 tahun 4 bulan hukuman penjara. Pertimbangan hakim Putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi penuntut umum dan terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dan membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Pendapat penulis bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa pemalsuan surat yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah ini seharusnya lebih berat dari putusan yang ada karena merusak administrasi pemerintah setempat serta merugikan opsional khusus badan hukum CV. Mitra Bersama bahkan dapat merugikan orang lain.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, hukum, Tindak Pidana, Pemalsuan.

¹ Mahasiswa

² Pembimbing satu

³ Pembimbing dua

CRIMINAL ACCOUNTABILITY FOR FORGERY CONTENT OF THE DECREE OF THE GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI THAT HAS DAMAGE TO OTHERS

(Case Study of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 948 K/PID/2020)

Sarwedi¹
Dr. Ibnu Afan. SH., MH²
Dr. Marlina SH., M.Hum³

ABSTRACT

Counterfeiting is a form of act that is referred to as a crime, namely as an act that is contrary to the interests of the law. At present there are many criminal acts of counterfeiting with various forms and developments

The problem is how is the legal regulation of the criminal act of forging the contents of letters in statutory regulations?, What is the responsibility for the act of forging the contents of letters in statutory regulations?, What is the judge's consideration of the act of falsifying the contents of the Central Sulawesi Governor's decision in the Supreme Court of the Republic of the Republic of Indonesia? Indonesia Number 958 K/PID/2020?

The research method used is normative legal research. Normative legal research focuses on an inventory of positive law, principles and legal doctrine.

Research Results Legal arrangements for the crime of forgery in statutory regulations, forgery of letters are regulated in Article 263 to Article 276 which can be divided into seven types of crime of forgery of letters. Legal responsibility for the forgery of the Central Sulawesi Governor's letter is contained in article 263 of the Criminal Code with a maximum imprisonment of 6 years and in the case of forgery of the contents of the Central Sulawesi Governor's Decree Number: 540/585/DISESDMG. ST/2015 the Palu District Court judge sentenced the defendant to only 3 years and 4 months in prison. Judex Facti's decision is not contrary to law and/or statutory law, so the public prosecutor's cassation request and the defendant are declared rejected and the court costs at cassation level are Rp. 2,500.00 (two thousand five hundred rupiah). The author's opinion is that the judge in sentencing the defendant for forging a letter issued by the Governor of Central Sulawesi should be heavier than the existing decision because it damaged the administration of the local government and harmed the special operations of the legal entity CV. Mitra Bersama can even harm others.

Keywords: Responsibility, law, crime, counterfeiting

1. Student
2. Advisor one
3. Advisor two